

REPRESENTASI MENTALITAS JOKOWI: Menyoal Narasi *Public Sphere* di Balik Kasus “Papa Minta Saham”

Oleh: Jalaluddin B

Staf Pengajar Pada Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract;

This study focuses on how the public sphere articulated and played by a state leader (President). In connection with it, it aims to unveil the efforts of the state leader who articulates and plays the public sphere. The method of this study is focused on the type of qualitative research with a critical analysis of Jürgen Habermas's perspective which concentrates with the notion of the public sphere as a communicative action that accentuates an analysis of the social reality built by the State. The results of this study explain that the idea of public sphere undergoes a significant change that no longer places people as its main subject, but also gets the state involved into the rotation of this public sphere through internalizing the State as a subject that should be heard and protected, not to mention as the object of talk. The implication of this study is to demonstrate that public sphere will be more accommodating to individuals or groups who are good at playing the discursive of grass root people.

Kata Kunci : Public Sphere, Jokowi.

A. Pendahuluan

Tidak bermaksud membuka luka lama mengenai kasus “**Papa Minta Saham**” karena hal ini mungkin akan menimbulkan kebencian tersendiri, namun apa yang terjadi pada peristiwa itu mengingatkan kita pada konsep Jürgen Habermas, seorang akademisi beraliran kritik, tentang *public sphere*-nya. Kritik namun sederhana karena konsep ini menekankan pada tindakan komunikasi, hal yang menjadi rutinitas umat manusia sehari-hari. Era demokrasi saat ini seakan menyambut kesederhanaan konsep tersebut yang sejalan dengan hakikat dari demokrasi itu sendiri. Konsep yang lahir sebagai refleksi kesadaran diri akan praktik kekuasaan yang dilakukan oleh mereka yang mendapatkan mandat dari rakyat sebagai pemimpin yang jauh dari rasa keadilan dan keprihatinan terhadap rakyat yang telah memilih mereka. Manifestasi kekuasaan yang mereka dapatkan dari mandat ini justru dipergunakan untuk meraup keuntungan pribadi atau golongan mereka sendiri. Rakyat menyadari hal itu, tetapi celakanya mereka hanya mampu berbicara dan menyampaikan aspirasi mereka di

ruang-ruang publik yang pada gilirannya hanyalah sebuah “angin ribut” yang akan hilang dalam hitungan menit. Saya memahami bahwa kekuasaan merupakan sumber kekuatan yang karenanya kita dapat melakukan apapun termasuk menyampaikan kehendak kita kepada orang lain untuk dilaksanakan. Kekuasaan yang ditandai dengan penguasaan aset politik, ekonomi, pendidikan, agama, hukum dan lain sebagainya, menjadikan aktor-aktornya kadangkala bertindak semena-mana, bahkan tanpa disadari larut dalam kenikmatan akan kekuasaan itu. Penggunaan kekuasaan yang berlebihan mengarahkan penggunaannya untuk bersikap tidak adil terlebih kepada kaum marjinal atau kelompok minoritas yang tersisihkan akibat ketidakmampuannya bersaing dengan para penguasa (baca: pemerintah dan pengusaha).

Hal di atas tidak dapat mungkir telah menciptakan kesenjangan yang cukup besar, karena para kelompok tersebut direposisi menjadi kelompok inferior di bawah kelompok superior. Penguasaan atau yang diistilahkan praktik dominasi oleh kelompok posmodernisme melahirkan hegemoni ini, membuat jurang sosial semakin dalam, yang di atasnya berdiri kelompok penguasa dan dengan kekuasaannya menciptakan tatanan-tatanan struktur sosial yang cenderung mengedepankan pandangan homosentris mereka terhadap kelompok di luarnya. Konsekuensinya, praktik dominasi ini menjadikan mereka semakin kuat untuk menginjakkan kaki-kakinya dalam struktur sosial yang ada. Kalaupun ada struktur sosial yang memberi ruang bagi kelompok marjinal ini, hal tersebut sesungguhnya hanya sekadar rekayasa sosial mereka untuk menekan ruang aspirasi dan kesadaran kritis kelompok sub-struktur tersebut. Dengan pemahaman lain, kenikmatan sesaat itu hanyalah sebuah aleniasi, sebuah kondisi yang mengasingkan subjek-subjek tersebut dalam arus perputaran kelompok penguasa sebagai penikmat sejati.

Alih-alih memberikan ruang, hal ini justru dilakukan untuk mengukuhkan eksistensi keberadaan kelompok penguasa terhadap kelompok lainnya. Mereka membutuhkan kelompok lainnya agar keberadaan diri mereka terakui, “*We vs. The Others*”. Apa yang kemudian disebut sebagai kebebasan dan kemerdekaan tidak lain adalah sebuah perbudakan terselubung yang sesungguhnya jauh lebih merampas kemerdekaan dan kebebasan itu sendiri demi menjaga *status-quo* kelompok elite tersebut.

Satu di antara sekian banyak kelompok penguasa adalah pemerintah. Pemerintah merupakan organisasi tertinggi dalam sebuah negara yang memiliki kekuasaan penuh

terhadap rakyatnya lewat praktik-praktik yang mereka lakukan. Menguasai, mengontrol dan memerintah adalah beberapa praktik kekuasaan yang dimaksudkan. Praktik tersebut tidaklah dijalankan begitu saja tanpa adanya legalitas hukum dan politik yang mereka miliki. Artinya, hukum dan politik menjadi alat legitimasi yang absolut untuk setiap praktik mereka sekaligus alat pembenaran atas hal tersebut (normatif). Bersamaan dengan itu, kehadiran lembaga-lembaga formal seperti; media, politik, militer, agama, dan sebagainya semakin menguatkan kehadiran entitas mereka.

Hal ini senada dengan apa yang disebutkan oleh Louis Althusser mengenai aparatur negara (pemerintah) yang bekerja melalui apa yang disebutnya *Ideological State Apparatus* (ISA) yang mendorong keberadaan lembaga-lembaga antara lain; agama, pendidikan, media, dan keluarga untuk menaklukkan keberadaan rakyatnya sekaligus melanggengkan kekuasaan yang termanifestasi dalam ideologi mereka secara persuasif dan ideologis. Namun demikian, tidak jarang pula tindakan semacam *Repressive State Apparatus* (RSA), yakni tindakan-tindakan represif oleh negara terhadap rakyatnya dengan memanfaatkan lembaga-lembaga seperti; militer, polisi, penjara, serta pengadilan juga ditempuh untuk menakut-nakuti dan kalau tidak dalam keadaan terpaksa melakukan aksi teror kepada rakyat kecil.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Louis Althusser, Karl Marx mengistilahkannya sebagai superstruktur, yaitu pemerintah sebagai entitas tatanan dominatif dan legitimatif dalam sebuah struktur kenegaraan yang merumuskan hubungan hirarkis antara pemerintah itu sendiri dengan rakyatnya. Hal tersebut diperkuat dengan keberadaan lembaga-lembaga seperti: media, agama, pendidikan, hukum dan lainnya sebagai penguat, guna melatinkan hegemoni mereka (baca: *basic structure*). Dengan demikian, entitas struktur sebagai domain elite pemerintahan lahir sebagai bentuk pengawasan, pengontrolan, atau bahkan pengekangan terhadap suara-suara rakyat. Akan tetapi, era demokrasi saat ini mengisyaratkan lain bahwa suara-suara emansipasi rakyat seakan keluar dari dalamnya jurang sosial yang dibangun mapan oleh sebuah negara.

Menurut Patrick Wilson (Abdul Rozak, 2008: 23), demokrasi adalah komunikasi dalam ruang publik yang beradab di mana orang dapat saling berbicara dalam masalah bersama dan membentuk nasib bersama pula, guna terlindunginya warga negara dari kekerasan, ancaman, dan *state terrorism*. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang ditandai

dengan ruang publik adalah suatu nilai yang pada dasarnya menjunjung tinggi kebebasan bersuara tanpa terkecuali dengan menekankan pada rasa keadilan, dan keamanan.

Melihat sejarah kepemimpinan kita, sangat jarang ditemukan seorang pemimpin di negara ini memanfaatkan ruang publik (demokrasi) sebagai ruang bersama untuk berdialog bersama-sama menyampaikan dan mendengarkan aspirasi masing-masing guna mencapai tujuan bersama. Hampir sebagian pemimpin di negara ini lebih mengedepankan aspirasi otoritas mereka untuk menentukan sebuah kebijakan tanpa mengindahkan suara rakyat (publik). Artinya apa yang diputuskan oleh pemerintah menjadi sebuah keputusan absolut yang harus diterima oleh rakyat. Akan tetapi, tidak demikian dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo yang sangat bergairah mendengarkan aspirasi rakyat yang terakomodir melalui ruang publik guna mempertontonkan suatu pengambilan kebijakan. Artinya, suara antarelite (penguasa) dan publik (rakyat) telah terafiliasi menjadi satu kesatuan yang mengedepankan pada *equality space* (ruang persamaan). Hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa yang melibatkan nama beliau pada kasus yang sempat melandanya di akhir tahun 2015, yakni kasus pencatutan nama pribadinya selaku Presiden oleh Ketua DPR-RI, Setya Novyanto, terkait perpanjangan kontrak perusahaan emas PT. Freeport di Papua, Indonesia.

Salah satu pemberitaan yang sempat disiarkan oleh saluran Berita Satu, yakni *Prime Time* tepat pada pukul 13:43, Presiden RI, Joko Widodo mengomentari kasus “Papa Minta Saham” yang menyeret namanya dengan menyatakan bahwa:

“setiap hari saya selalu memantau, mengikuti jalannya proses di MKD, selalu saya ikuti.....saya ingin agar MKD melihat fakta-fakta yang ada, lihat fakta-faktanya. Yang kedua, dengarkan suara publik, dengarkan suara masyarakat, dengarkan suara rakyat”.

Dari sini, dapat dilihat bagaimana seorang Presiden RI, Joko Widodo dengan bergairahnya memanfaatkan ruang publik terhadap kasus yang melandanya, bahkan menyebutkan secara sadar kata “rakyat” sebanyak tiga kali yaitu, publik, masyarakat, dan rakyat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ruang publik telah *terkopulasi* antara pemerintah dan penyebutan kata “rakyat” tersebut, yang sebenarnya Habermas berbicara ruang publik sebagai rakyat dan rakyat sebagai ruang publik. Dengan demikian, ada semacam perayaan yang coba dipraktikkan oleh Joko Widodo yang secara moral ingin menyatukan

dirinya dengan rakyat di tengah makin eksklusifnya kalangan elite pemerintahan kita. Fakta premis ini semakin menarik untuk dikaji ketika mengetahui bahwa sejak era demokrasi dipimpin Ir. Soekarno sampai era demokrasi saat ini, seorang pemimpin jarang bahkan hampir tidak menggunakan suara publik dalam proses pengambilan keputusan, namun berbeda dengan Joko Widodo yang dengan kepercayaan dan keyakinan diri yang tinggi menggunakan suara rakyat untuk mencoba memengaruhi sebuah pengambilan keputusan. Padahal elite penguasa ini (Presiden) mampu menekan dan memengaruhi suatu sikap pengambilan keputusan dari lembaga negara lainnya seperti pada era-era sebelumnya. Peristiwa ini menjadi semakin menarik ketika mencoba merefleksikan konsep ruang publik Jürgen Habermas yang sangat menggaris bawahi keberadaan rakyat sebagai masyarakat tunggal dengan kesadarannya (refleksi-diri) mampu keluar dari kebekuan dominasi dan hegemoni kelompok elite, justru secara tidak langsung digunakan pula oleh kelompok elite (pemerintah). Dengan kata lain, ruang publik tidak lagi menjadi domain rakyat ke pemerintah (*bottom-up*), tapi kini bergeser menjadi ruang pemerintah ke rakyatnya (*up-down*). Secara singkat, penulis berasumsi bahwa ruang publik kini mengalami rekontekstasi pemaknaan terlebih di era-reformasi saat ini yang jauh berbeda dari masa Habermas berada.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, yakni bagaimana kemunculan Presiden Joko Widodo sebagai aktor elite penguasa hadir dalam ruang publik yang cenderung berafiliasi pada rakyat kecil dengan karakter demokrasi radikalnya, mengalami rekontekstasi pemaknaan yang tidak lagi menekankan pada rakyat, namun juga kalangan elite (pemerintah) di dalamnya. Semakin menarik ketika kita menyadari bahwa ruang publik yang sejak awal dikhususkan sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap hegemoni politik pemerintah meninggalkan gerakan revolusioner Karl Marx, kini disusupi pula oleh kelompok elite. Karena alasan itu, peneliti merumuskan sebuah masalah, yaitu *bagaimana konsekuensi dari ruang publik yang coba dipraktikkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kasus pencatutan namanya atas kasus "Papa Minta Saham"?*

B. Jürgen Habermas: Ruang Publik Sebagai Refleksi-Diri.

Memahami pemikiran Habermas adalah suatu hal yang tidak mudah terlebih bagi mereka yang baru belajar mengenai teori-teori kritis yang dipelopori oleh sekelompok pemikir kritis dari Jerman yang dikenal sebagai *Mahzab Frankfurt School* dimana di antaranya adalah

Horkemeir sebagai guru dari Habermas sendiri. Paradigma kritis adalah sebuah refleksi kritis akan realitas yang dituduh telah melakukan distorisasi mengenai fakta-fakta kehidupan. Pada posisi inilah Habermas turut menyumbangkan ide kritisnya yang pada dasarnya menekankan pada intersubektivitas masing-masing individu. Dalam beberapa buku terjemahan, salah satunya yang dituliskan oleh Frans Budi Hardiman (2009) dengan judul bukunya “*Kritik Ideologi Menyingkap Pertautan pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*”, Habermas banyak dilukiskan sebagai salah satu generasi ke dua pemikir kritis yang ikut mengkritisi generasi paradigma kritis. Baginya pemikir kritis generasi pertama belum mampu mengintegrasikan antara rasionalitas manusia ke dalam sebuah *praxis* hidup sosial. Adalah benar memandang modernisme sebagai bentuk pencerahan yang melepaskan diri manusia dengan sifat saintisme, positivisme, dan teknoratismenya, namun masih saja menjadikan manusia irasional. Hal ini dikarenakan menurut pandangan Habermas bahwa kekhawatiran muncul ketika rasionalitas yang diproduksi oleh sekelompok orang tertentu tanpa menghadirkan pihak lainnya (rasionalitas tujuan). Dengan bahasa lain, akan ada ketimpangan struktur (baca: perbudakan gaya baru) rasio manusia yang lebih memihak pada kelompok-kelompok tertentu sebagaimana kritiknya terhadap konsep Marx yang menjelaskan bahwa terjadi pemisahan antara negara dan rakyatnya yang ditandai dengan adanya hubungan antara basis ekonomi dan super-struktur politis yang menguatkan keberadaan negara di atas rakyatnya. Dengan begitu, pemahaman rasio manusia para pendahulunya yang lebih menekankan pada paradigma kerja digantikan oleh Habermas sebagai paradigma komunikasi yang lebih menekankan pada dialog komunikatif dan tindakan komunikatif sebagai *praxis* emansipatoris.

Bagi Habermas tindakan komunikatif adalah suatu upaya yang bisa ditempuh oleh setiap individu dalam melepaskan atau mencairkan kebekuan dominasi kelompok-kelompok elit yang ada di masyarakat. Hal ini sangat memungkinkan dikarenakan tindakan komunikasi adalah bagian dari praktik sosial manusia yang bisa digunakan masing-masing individu untuk menyampaikan aspirasi mereka. Meskipun tiap individu berhak menyampaikan rasionalitas mereka lewat tindakan komunikasi ini, tidak berarti ada kesewenang-wenangan di dalamnya. Rasionalitas haruslah terdiri dari empat klaim validitas seperti yang diutarakan oleh

Habermas, yaitu klaim kebenaran, klaim ketepatan, klaim auntsitas dan klaim komprehensibilitas.

Masyarakat komunikatif adalah masyarakat yang melakukan kritik lewat argumentasi mereka, bukan dengan cara revolusioner (sikap represif). Kegiatan inilah yang diyakini oleh Habermas sebagai gerakan emansipatoris guna membawa perubahan sosial, sebuah perubahan yang paling tidak dari sini dapat menurunkan atau mencairkan sedikit dominasi kelompok elit atas dasar pertimbangan rasionalitas kelompok *liyan (the others)* ini.

C. Menyoal Permasalahan Ruang Publik

Era demokrasi saat ini telah sedikit banyak membawa angin segar bagi masyarakat utamanya mereka yang selama ini masih merasakan penindasan baik oleh negara maupun kelompok elit lainnya. Demokrasi yang ditandai dengan ruang kebebasan dalam menyampaikan aspirasi telah mendorong manusia membebaskan diri mereka dari belenggu ketidakadilan meski sesungguhnya belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Mereka tidak bertanya lagi apa yang harus saya ketahui dan katakan, tapi lebih dari itu masyarakat akan bertanya apakah yang dapat saya harapkan. Pertanyaan ini tentu mengandalkan pemikiran rasio praktis, sebuah pemikiran yang di atasnya terdapat sebuah kehendak untuk melepaskan diri yang berujung pada lahirnya pemikiran rasio murni.

Bukan persoalan mudah melihat publik memanfaatkan demokrasi saat ini di mana sangat mengandalkan ruang publik dalam tahap pelaksanaannya. Hal pertama yang menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat itu adalah bagaimana melepaskan diri mereka dari dogmatisme negara yang selama ini sangat matang dan mapannya menanamkan ideologi mereka dengan bantuan media, agama dan lembaga-lembaga formal lainnya. Masyarakat harus melakukan apa yang dimaksud oleh Habermas sebagai kegiatan kognitif, yakni sebuah refleksi-diri. Dengan refleksi-diri yang kita miliki akan menghantarkan manusia mengubah eksistensi diri mereka akibat adanya dorongan kesadaran baru dari proses kegiatan kognitif tersebut. Hal inilah yang dikatakan oleh Habermas sebagai tindakan emansipatoris. Habermas dalam (F. Budi Hardiman 2009: 187) menuliskan bahwa:

“Refleksi-diri adalah intuisi sekaligus emansipasi, pemahaman sekaligus pembebasan dari ketergantungan dogmatis.”

Meskipun demikian, tindakan emansipatoris diawali dengan adanya demokrasi yang mampu menciptakan ruang publik sebagai buah refleksi-diri tidak serta merta meninggalkan kesan positif. Perlu perhatian lain mengenai kehadiran ruang publik tersebut, yaitu kondisi riil masyarakat *grass root*. Artinya bahwa pada level ini masih banyak persoalan intern yang juga menjadi persoalan mereka sebelum memasuki ruang publik ini. Persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, persoalan geografis, dan persoalan sosial lainnya terkadang kalau tidak diperhitungkan akan membawa dampak negatif yang semakin tajam menukik/ misal, fakta angka pendidikan masyarakat kita yang jauh masih rendah mengindikasikan ketidakterpenuhannya validitas dan klaim kebenaran kita terhadap obyek pembicaraan karena ruang publik tidak hanya mengedepankan ruang kebebasan berekspresi, namun juga sangat menekankan rasio komunikatif berupa kebenaran, ketepatan, kejujuran dan komprehensibilitas, yang dipandang rasional dan akan diterima tanpa paksaan sebagai hasil konsensus. Dengan demikian, sangatlah dilematis melihat antara ruang publik dengan rasio komunikatif dan kadar pendidikan publik yang masih rendah, dan pada akhirnya kembali dimenangkan oleh pemerintah sebagai lumbung teknokrat berpendidikan yang secara bersamaan membuahkan sebuah kekuasaan.

Senada yang dikatakan oleh Michele Foucault dalam (Mansour Fakih, 2010: 86) bahwa hubungan pengetahuan adalah hubungan kekuasaan. Cita-cita bangsa dengan lahirnya era demokrasi tersebut menjadi bumerang tersendiri yang justru akan menimbulkan konflik baru di level *grass root* karena demokrasi yang menekankan pada komunikasi dengan sendirinya adalah usaha untuk saling menguasai. Dalam arti lain bahwa jangan biarkan ruang publik ini begitu bebas bergerak pada level *grass root* karena dikhawatirkan hal ini akan memberikan persoalan baru dan pada gilirannya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak yang berkepentingan. Menurut penulis, negara dan kelompok lainnya (pengusaha) adalah orang-orang yang diuntungkan dalam ruang publik tersebut. Ruang publik ini sadar atau tidak sejatinya melatenkan atau memapankan eksistensi negara dan kelompok lainnya dikarenakan topik pembicaraan mereka hanyalah kelompok-kelompok elit tersebut. Dengan demikian, ruang publik ini adalah ruang publik yang sejak dari awal telah didikte oleh negara dan kelompok elit lainnya yang sengaja dirasionalkan demi keuntungan mereka.

Hal ini menjadi catatan penting sesungguhnya dari lahirnya ruang publik milik Habermas bahwa ruang publik tidak bisa diyakini sepenuhnya sebagai sebuah keyakinan baru dalam melakukan perubahan sosial melalui tindakan emansipasinya. Dengan keyakinan lain bahwa demokrasi dan ruang publik adalah bentuk *reifikasi* yang seolah-olah permanen dan alamiah pada praktiknya namun sesungguhnya keadaan tersebut bersifat temporal. Keadaan ini memperlihatkan bagaimana relasi kuasa atau hubungan dominasi dapat dibentuk dan dipertahankan secara temporal namun seolah-olah bersifat permanen dan alamiah. Satu diantaranya adalah strategi nominalisasi, yaitu sebuah strategi konstruksi simbolik yang memposisikan pelaku menjadi kata benda agar terkesan netral. Di sini, pandangan kritik Habermas pada akhirnya jatuh pada kondisi pesimistik yang tidak jauh berbeda dengan generasi pertamanya.

Ruang publik yang sangat diimpikan oleh Habermas sebagai ruang demokratis menemui tantangan di era serba informasiasat ini dimana tindakan demokrasi dideterminasi oleh kecenderungan teknologi media massa. Hal ini tidak hanya sebagai pintu informasi, tetapi juga sebagai pintu determinan dalam bangunan kebijakan tertentu yang berujung pada restrukturasi tatanansosial karena terpaan dan redudansi teknologi tersebut tidak bisa dihindari. Pada posisi ini teknologi media massa memainkan peran pentingnya dalam membangun atau membentuk kesadaran pemirsanya secara persuasif, merubah yang jahat menjadi baik atau yang baik menjadi jahat. Munculnya persoalan ini, sedikit banyak membalikkan gagasan dan cita-cita Habermas.

D. Pembahasan

Jokowi: Antara Diri dan Ruang Publik

Sosok Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia ke-7 telah banyak menyita mata publik. Kehadirannya sebagai Gubernur D.K.I Jakarta sebelum menjadi presiden saat ini memberi perspektif baru dalam menilai seorang pemimpin. Dia tidak segan untuk turun ke saluran pembuangan air limbah atau gorong-gorong untuk mengecek hal-hal yang menyebabkan Jakarta banjir. Ia pun dengan gaya “blusukan”nya ke pasar-pasar menemuisecara langsung rakyat Jakarta dan mendengarkan keluhan-keluhan mereka yang tak

jarang langsung ditindaklanjuti oleh bawahannya. Gaya “blusukan” Jokowi memang menjadi fenomena tersendiri saat itu hingga kini, namun tak sedikit juga yang mencibir gayanya sebagai bentuk pencitraan. Akan tetapi, bukankah politik adalah citra dan citra adalah politik? Paling tidak pencitraan itu tidak lebih dan tidak kurang, yang jika itu terjadi akan menampilkan ketidaknampakan atau kebutaan politik. Senada yang disampaikan oleh Yasraf A. Piliang (2005) bahwa politik layaknya sebuah cahaya yang mampu memberi pencerahan dalam kegelapan dan cahaya itu haruslah tepat karena dengan begitu pencerahan akan didapatkan. Para analis politik sendiri, di sisi lain, melihat hal tersebut adalah sebuah kampanye model baru yang menembus model mainstream yang selama ini terkesan kaku dan eksklusif dalam panggung politik. Berbeda sudah tentu, dengan gaya blusukan ini, Jokowi seakan membuka pandangan baru bahwa sejatinya pemimpinlah yang harus menjemput dan mendengarkan aspirasi rakyatnya sebagai seorang pelayan publik bukan sebaliknya.

Melihat apa yang ditunjukkan oleh Jokowi rasanya seperti oase di tengah gurun pasir yang selama ini kita rindukan. Sosok pemimpin yang tidak hanya tegas, tapi juga *sociable* (merakyat). Pemimpin yang menyadari betul bahwa suara rakyat dapat pula berkontribusi mendorong keputusan-keputusan tertentu dalam pemerintahan. Hal ini seperti ditunjukkan Jokowi kepada rakyat ketika ada kasus, yakni “**Papa Minta Saham**” menerpanya. Kasus ini melibatkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto yang mencoba mencatut nama Presiden Joko Widodo mengenai perpanjangan PT. Freeport di daerah Papua tanpa sepengetahuan beliau. Seperti kita ketahui bersama bahwa PT. Freeport adalah salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang keberadaannya memberikan cukup besar pemasukan pajak kepada negara. Hampir sebagian besar anggaran belanja negara bersumber dari perusahaan ini. Karena itu, tidak mengherankan kemudian banyak oknum yang ingin ikut andil merasakan keuntungan baik pribadi maupun kelompok dari kerjasama tersebut. Singkat cerita, kasus yang melibatkan Setya Novanto dan Presiden R.I. yang dicatut namanya telah disidangkan oleh dewan kode etik DPR dan tidak menutup kemungkinan sampai di ranah hukum terbilang sebagai kasus penipuan.

Dalam kasus ini terdapat potongan narasi yang sangat menarik diartikulasikan oleh Presiden Jokowi ketika di salah-salah wawancaranya bersama para Jurnalis menggarisbawahi arti penting suara rakyat yang ia pandang sebagai bentuk keseragaman aspirasi untuk

mengadili pimpinan DPR sesuai konstitusi hukum yang berlaku. Dari fakta tersebut, nampak sekali kesadaran diri seorang Jokowi di dalam menyampaikan aspirasi pribadinya kepada masyarakat yang selama ini penasaran dengan sikap Jokowi terhadap kasus yang melanda dirinya. Hal ini menghadirkan pertanyaan, apa yang mendorong Jokowi selaku Presiden mengartikulasikan suara rakyat sebagai bentuk reaksi dirinya terhadap kasus ini? Dan, apakah betul Jokowi memposisikan dirinya sama dengan suara rakyat dalam menyikapi kasus tersebut pada saat itu? Tanggapan pertanyaan kedua paling tidak Jokowi yang mampu menjawabnya sendiri.

Dalam kaitan artikulasi suara rakyat sebagai reaksi Jokowi terhadap kasus “**Papa Minta Saham**”, jika perspektif *Public sphere* Habermas digunakan sebagai dasar analisis dalam tulisan ini yang menekankan bahwa *Public sphere* lahir sebagai bentuk perlawanan akan rasa frustrasi rakyat kepada *state* (Negara), yang selama ini terkesan mengambil hak-hak mereka, lewat apa yang dikatakan oleh Jurgen Habermas dalam F. Budi Hardiman (2009: 91), yaitu tindakan komunikatif (*communicative action*) yang mendorong pencapaian sebuah praksis. Sebuah argumentasi rasional yang bersifat dialogis antara kelompok sasaran dan kelompok di luar sasaran untuk membina suasana saling memahami demi pencapaian konsensus. Dengan kata lain, capaian akhir konsensus terkondisikan pada turunnya Setya Novanto dari kursi jabatannya sebagai ketua DPR adalah bentuk konfigurasi argumentasi rasional yang dibangun Jokowi secara simetris bersama dengan masyarakat. Ketika ruang publik (*public sphere*) itu ditulis atas nama rakyat, maka ia akan semakin *powerful*. Inilah yang dimaksud sebagai pendekatan konsensus, sebuah pendekatan yang menggeser pendekatan konflik atau represif di dalam sebuah pengambilan keputusan karena di dalamnya terdapat klaim kejelasan, kebenaran, kejujuran, dan kompleksitas pengetahuan tersebut yang lahir dari tindakan komunikatif.

Di sisi lain, artikulasi politik Jokowi bersama suara rakyat tersebut menunjukkan rasa ketidakpercayaan diri seorang Jokowi. Legitimasi politik dan hukum yang dimilikinya sebagai seorang Presiden cenderung terlihat lemah sehingga Ia membutuhkan instrumen penguat akan legitimasi politik dan hukum yang diperolehnya dari suara rakyat. Meskipun demikian, beberapa hari setelahnya Setya Novanto mengundurkan diri dari kursi jabatannya. Apakah ini buah hasil dari argumentasi rasional yang terartikulasikan di ruang publik yang seakan-seakan

menjadi afiliasi dari suara rakyat atau tidak, paling tidak hal tersebut menggaransi Jokowi bahwa tindakan komunikasi yang dipratikkannya mampu memberikan perubahan. Hal ini dapat dikatakan bahwa rasio instrumen tidak lagi menjadi pilihan yang ideal di dalam melakukan perlawanan terlebih perlawanan terhadap kelompok elit, tapi dengan rasio komunikatif dapat melemahkan posisi kelompok tersebut.

Jika pada awal konsep ruang publik menyandarkan dirinya pada tindakan komunikatif masyarakat sebagai bentuk reflektif diri mereka terhadap negara sebagai superstruktur yang sangat mapan dan hegemonik, maka persoalan selanjutnya bagaimana konsekuensi dari hakikta awal ruang publik ketika melibatkan individu atau kelompok elite yang selama bertahun-tahun menjadi obyek pembicaraan masyarakat? Ada ketakutan tersendiri yang muncul dari pertanyaan ini bahwa mentalitas dan totalitas masyarakat dalam memahami realitas belum sepenuhnya utuh sehingga masyarakat seakan terhipnotis dengan realitas ini (kesadaran palsu). Persoalan ini juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan media massa yang ikut membangun realitas palsu (*pseudo-event*) tersebut sehingga masyarakat terperangkap di dalamnya. Akhirnya yang terjadi adalah masyarakat (lagi-lagi) hanya dimanfaatkan dalam pusaran kepentingan elite negara dan penguasa yang kehadirannya begitu dominan. Ruang publik seakan menjadi teater pertunjukkan seni guna menarik simpati dan perhatian masyarakat. Kata-kata (ter)zalim(i) seakan-akan menjadi kata ampuh untuk meluluhkan hati masyarakat demi mendapat dukungan dari mereka. Dengan demikian, ruang publik tidak lagi hadir sebagai ruang reflektif diri dengan kepentingan praksisnya, namun menjadi panggung teater yang mengutamakan manajemen impresi untuk meluluhkan dan mendapatkan simpati masyarakat. Permainan-permainan kata yang lazim didengar oleh masyarakat dimainkan oleh sang elite sehingga memposisikan diri mereka seolah sama dengan rakyat kecil. Akibatnya adalah rakyatseakan terpanggil untuk membantu ketika melihat ada salah satu teman mereka yang dizalimi.

Implikasi dari peristiwa ini menunjukkan dengan jelas bahwa ruang publik yang dulu hanya milik rakyat sebagai tempat mereka mencari rasa keadilan kini ikut pula dinikmati oleh kelompok elite yang sejatinya menjadi obyek pembicaraan mereka. Ruang publik tidak lagi menjadi ruang refleksi kolektif bagi rakyat untuk mencari strategi mematahkan atau mencairkan kebekuan dominasi kelompok elite yang selama ini dipandang tidak adil, akan

tetapi kini ruang publik telah menjadi “santapan” bagi kelompok elite ini baik dikarenakan perubahan politik maupun perubahan (teknologi) informasi. Ruang publik seakan akomodatif dengan mereka padahal di balik kepentingan itu ada *status-quo* yang harus dipertahankan. Ruang publik yang seharusnya merupakan ruang kritik kini menjadi ruang idealis bagi mereka yang memiliki keyakinan tegak lurus dan kaku.

E. Kesimpulan

Gagasan ruang publik yang lahir diperuntukkan bagi masyarakat atau rakyat kecil kini telah bergeser menjadi panggung teater bagi kelompok elite dalam hal ini negara. Ruang publik yang seharusnya menjadi refleksi kolektif masyarakat untuk membicarakan mengenai kemanusiaan dan keadilan mereka justru ditumpangi oleh kepentingan politik yang pada gilirannya menimbulkan penyimpangan ruang publik atau *public sphere deviation*. Artinya adalah ruang publik tidak lagi menjadi kritis dikarenakan determinasi kepentingan politik “deso” dari seorang pemimpin negara yang cenderung mendekatkan dirinya sama dengan rakyat kecil.

Daftar Pustaka:

- A, Yasraf Piliang. *Transpolitika Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas*. Jelasutra: Yogyakarta. 2005.
- Budi, F. Hardiman. *Kritik Ideologi Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Kanisius: Yogyakarta. 2009.
- Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial Pergerakan Ideologi LSM Indonesia*. Insist Press: Yogyakarta. 2010.
- Takwin, Bagus. *Akar-Akar Ideologi “Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu”*. Jelasutra: Yogyakarta. 2003.